

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI  
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh:**

**CHALOLLAH NUSA PERTIWI**

**NIM. 07011182025013**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS  
KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)  
DI KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

**Oleh :**

**Chalollah Nusa Pertiwi  
07011182025013**

**Pembimbing**

**Tanda Tangan**

**Tanggal**

**Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001**

---

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**


**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**  
**“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS**  
**KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KOTA PALEMBANG”**

**SKRIPSI**

Oleh :

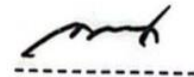
**CHALOLLAH NUSA PERTIWI**  
**07011182025013**

**Telah dipertahankan di depan penguji**  
**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**  
**Pada tanggal 21 Maret 2024**

Pembimbing :

**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan



Penguji :

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



**Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si**  
NIP. 199508142019032020



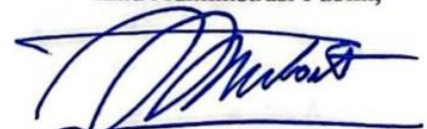
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik,



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chalollah Nusa Pertiwi

NIM : 07011182025013

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan  
Palembang, 6 Maret 2024



Chalollah Nusa Pertiwi  
NIM. 07011182025013

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”  
(QS. Al-Baqarah: 286)

*“Saya meminta sesuatu kepada Allah.  
Jika Allah mengabulkannya untuk saya,  
maka saya gembira sekali saja.  
Namun, jika Allah tidak memberikannya kepada saya,  
maka saya gembira sepuluh kali lipat.  
Sebab, yang pertama itu pilihan saya,  
sedangkan yang kedua itu pilihan Allah.”*  
- Ali Bin Abi Thalib

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Diri saya sendiri
2. Keluarga saya, Ayah, Ibu, Kakak, Adik
3. Orang-orang terdekat yang saya sayangi
4. Seluruh dosen dan pegawai FISIP UNSRI
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan  
Administrasi Publik Angkatan 2020
6. Almamater kuning kebanggaan, Universitas  
Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan judul "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kota Palembang" dengan baik tanpa halangan tertentu guna menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Terselesainya Skripsi ini tidaklah lepas dari doa, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Allah SWT, berkat izin, karunia, dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik hingga pada titik ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ayah Saiful Zuhri dan Ibu Henny Triana. Terima kasih atas semua kepercayaan yang diberikan kepada penulis, terima kasih untuk dukungan, doa, motivasi dan nasihat yang tidak hentinya diberikan untuk kelancaran studi penulis.
3. Drs. Mardianto, M.Si. selaku dosen pembimbing magang dan skripsi yang sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi dalam bentuk bimbingan dan semangat serta kemudahan dalam proses penyusunan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, selaku tempat penelitian yang telah memberikan izin dan kemudahan saat proses penelitian berlangsung.
5. Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si.
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
7. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Dr. Muhammad Nur Budiyanoto, S. Sos.,
8. Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Kampus Indralaya, Ita Permata Sari.
9. Fani Syahla, Anjani Paraswari, Inayah Salsabila, Ummu Azizah, Ardinda Salsabilah, Dela Alma, Adillah Salma, Filia Azzahra, Lathifa Nur Khalija, Dhandy Kusuma, Yas, Vin, Kay, selaku teman dan orang terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan, doa serta masukan selama proses penyusunan skripsi.
10. Rony Parulian, Nyoman Paul, Salma Salsabil, Nabila Taqiyyah, Abe Cekut, Abang-abang 'Agak Laen' dan WeR1 yang selalu membantu menjaga semangat penulis selama proses penyelesaian skripsi ini dan;
11. Semua pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 6 Maret 2024



Chalollah Nusa Pertiwi  
NIM. 07011182025013

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of using the Digital Population Identity Application in Palembang City. Normatively this policy is based on Home Affairs Regulation Number 72 of 2022 concerning Standards and Specifications for Hardware, Software, and Electronic Identity Card Stamps and the Implementation of Digital Population Identity. This research uses qualitative research methods. This research is reviewed from three aspects, namely, Goal Achievement, Integration, and Adaptation. Based on the results of the data analysis that has been carried out by the author, the result of the research is that the diverse views of the community indicate the expansion of approaches to ensure inclusiveness and wider acceptance. For now, the IKD application has provided significant benefits but still needs continuous efforts in overcoming the obstacles that arise so that its effectiveness can be improved as a whole.*

**Keywords:** *Digital Population Identity (ID), Effectiveness*

*Advisor,*

**Drs. Mardianto, M.Si.**  
NIP. 196211251989121001



Indralaya, 6 March 2024

Mengetahui,

**Chairman Of The Department**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**  
**NIP. 1969111019994011001**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Kota Palembang. Secara Normatif kebijakan ini adalah berdasar pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini ditinjau dari tiga aspek yakni, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan oleh penulis maka hasil dari penelitian adalah bahwa berbagai pandangan masyarakat yang beragam menunjukkan perluasan pendekatan untuk memastikan inklusivitas dan penerimaan yang lebih luas. Untuk saat ini aplikasi IKD sudah memberikan manfaat yang signifikan namun tetap perlu upaya berkelanjutan dalam mengatasi kendala yang muncul agar efektivitasnya dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

***Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital (IKD), Efektivitas***

**Pembimbing,**

**Drs. Mardianto, M.Si.**  
NIP. 196211251989121001



Indralaya, 6 Maret 2024  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**  
NIP. 1969111019994011001



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Konsep <i>E-Government</i> .....	12
2.1.2 Klasifikasi <i>e-Government</i> .....	13
2.1.3 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	14
2.1.4 Cara Instalasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)....	15
2.1.5 Konsep Efektivitas.....	16
2.1.6 Pengukuran Efektivitas.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Bepikir Penelitian.....	30
BAB III.....	33
METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Definisi Konseptual.....	33
3.3 Fokus Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4.1 Data Primer.....	37
3.4.1 Data Sekunder.....	37
3.5 Informan Penelitian.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6.2 Metode Wawancara.....	39
3.6.3 Metode Dokumentasi.....	40

3.7	Teknik Analisis Data .....	40
3.8	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	41
3.9	Jadwal Penelitian .....	42
3.10	Sistematika Penulisan .....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
4.2	Informan Penelitian .....	48
4.3	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	49
4.3.1	Pencapaian Tujuan .....	49
4.3.2	Integrasi.....	54
4.3.3	Adaptasi.....	59
BAB V.....		68
PENUTUP.....		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....		71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Rekapitulasi Registrasi IKD 2023 .....	7
Tabel 1. 2 Jumlah Data Penduduk Kota Palembang Tahun 2023.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	31
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	36
Tabel 3. 2 <i>Key Informan</i> Penelitian.....	38
Tabel 4. 1 Informan Penelitian.....	48
Tabel 4. 2 Data Aktivasi Perbulan di UPTD.....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital.....	5
Gambar 2. 1 Tampilan Aplikasi IKD.....	15
Gambar 4. 1 Model Analisis Data Interaktif.....	41
Gambar 4. 1 Tampak depan Kantor Dukcapil Kota Palembang.....	46
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Palembang.....	48
Gambar 4. 3 Daftar Zona UPTD.....	52
Gambar 4. 4 Sosialisasi IKD “ <i>Dukcapil Go To School</i> ”.....	56
Gambar 4. 5 Sosialisasi dan Aktivasi IKD ke Kampus di Kota Palembang.....	56
Gambar 4. 6 Sosialisasi Sosialisasi dan Aktivasi IKD ke Dinas-dinas.....	57
Gambar 4. 7 Loker Pelayanan Adminduk.....	60
Gambar 4. 8 Wawancara dengan warga terkait Aplikasi IKD.....	61
Gambar 4. 9 Loker Pelayanan IKD.....	62

## DAFTAR SINGKATAN

IKD	: Identitas Kependudukan Digital
KTP-el	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
UU	: Undang-undang
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
ADMINDUJK	: Administrasi Kependudukan
KK	: Kartu Keluarga
UPTD	: Unit Pelaksana Tugas Dinas

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 .....	lxxiii
Lampiran 2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	lxxix
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Seminar Proposal .....	lxxxii
Lampiran 4. Lembar Pengesahan Seminar Proposal.....	lxxxiii
Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal .....	lxxxiv
Lampiran 6. Lembar Bimbingan Komprehensif .....	lxxxv
Lampiran 7. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif .....	lxxxvi
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian.....	lxxxvii
Lampiran 9. Bukti Turnitin UNSRI .....	xcii
Lampiran 10. Surat keterangan Pengecekan Similairty .....	xcii

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu ciri paling mencolok dari abad ke-21. Perkembangan teknologi tidak hanya memengaruhi aspek-aspek kehidupan pribadi dan bisnis, tetapi juga telah mengubah sektor pemerintahan secara fundamental. Pemerintah semakin mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada warga negara. Perangkat pintar yang semakin cerdas dan terhubung secara digital telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Tren teknologi yang tengah berlangsung saat ini semakin mengintegrasikan dirinya dengan beragam sektor, baik di sektor publik maupun swasta, menciptakan peluang untuk pengembangan aplikasi dan layanan yang baru, dengan tujuan meningkatkan efisiensi penyampaian output kepada berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam bagaimana masyarakat dan organisasi beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi modern.

Transformasi digital telah memainkan peran yang sangat penting dalam reformasi dan modernisasi dokumen kependudukan. Dengan adanya Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*, serta perkembangan teknologi seperti IoT, Big Data, AI, dan robotika, sektor administrasi kependudukan juga telah mengalami transformasi yang signifikan. (Pangandaheng et al., 2022)

Penelitian Mergel, et al. (2019) menyatakan bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat akan layanan digital yang *real-time*, pemerintah harus meningkatkan standar operasional agar layanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, dengan tujuan utama untuk mencapai transparansi. Transformasi digital di sektor publik mengembangkan strategi transformasi digital yang komprehensif untuk organisasi meibatkan lebih dari sekadar membuat formulir online atau bertransisi dari layanan analog ke digital. Transformasi digital berdampak pada pemangku kepentingan internal dan eksternal, sehingga memerlukan peningkatan proses, layanan, dan produk yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan eksternal. (Pangandaheng et al., 2022)

Indonesia terus mendorong percepatan teknologi dalam proses administrasi negara dengan tujuan meningkatkan kinerja pelayanan dan tata kelola yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta memungkinkan pengambilan kebijakan publik yang lebih cepat (Mahmood, 2016). Salah satu langkah dalam kerangka kebijakan *e-government* adalah transformasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik menjadi IKD Digital.

Pemerintah kota Palembang melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang diatur dalam peraturan walikota nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang memiliki fungsi sebagai perangkat daerah yang menjalankan administrasi kependudukan. Salah satunya ialah menjalankan kebijakan tentang identitas kependudukan digital.



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2022 mengenai Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menetapkan target bahwa 25% dari total populasi penduduk, yang berjumlah 275.361.267 jiwa, akan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Seluruh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota diberikan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat mereka untuk beralih ke penggunaan KTP Digital. Sejalan dengan upaya ini, Kementerian Dalam Negeri RI telah melaksanakan pengembangan aplikasi kependudukan digital. Digitalisasi ini diharapkan data kependudukan dapat terintegrasi dan digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, pariwisata, transportasi, dan logistik.

Penerapan teknologi ini dalam dokumen kependudukan telah memungkinkan penciptaan identitas kependudukan digital yang lebih canggih. Misalnya, IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan data penduduk secara *real-time*, yang dapat digunakan untuk memperbarui informasi identitas penduduk dengan lebih cepat dan akurat. Big Data dan AI memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap data kependudukan, membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan yang lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi dalam dokumen kependudukan juga meningkatkan keamanan dan keandalan data.

Data pribadi yang sensitif dapat dienkripsi dan disimpan dengan lebih aman, mengurangi risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.

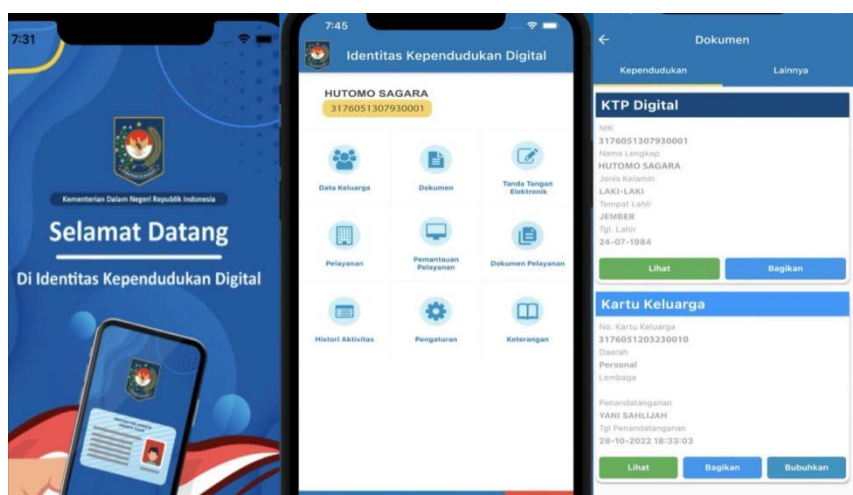
Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital memungkinkan pengembangan aplikasi dan sistem yang memudahkan warga dalam mengakses informasi kependudukan, mengajukan permohonan, atau melakukan perubahan status. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan publik yang berkaitan dengan dokumen kependudukan. Dengan demikian, transformasi digital telah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan dokumen kependudukan, membantu pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, serta memberikan kemudahan akses dan penggunaan identitas kependudukan oleh masyarakat secara lebih luas.

Aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) adalah salah satu implementasi konkret dari kebijakan identitas kependudukan digital yang mencerminkan pemanfaatan teknologi dalam administrasi kependudukan. Aplikasi ini berperan sebagai wadah atau alat untuk memfasilitasi penggunaan identitas digital oleh warga negara.

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 13 Ayat (2) tentang KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 16 Ayat (3) yaitu Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui pelayanan secara *daring* dan sejalan pula dengan visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yaitu “Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang *Go Digital* Dalam Rangka Mendukung Palembang Emas Darussalam 2023” dan juga misinya yaitu “Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan”

**Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital**



*Sumber: Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Playstore)*

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang sebagai tanggapan terhadap perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan dalam administrasi kependudukan. Salah satu alasan utama di balik pembuatan dan penerapan IKD kepada masyarakat adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data penduduk. Proses manual yang konvensional sering kali memakan waktu dan berisiko menghasilkan kesalahan, sementara teknologi digital, seperti IKD, memungkinkan pembaruan data secara *real-time*, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan

meningkatkan tingkat transparansi serta tujuan lainnya ialah dapat mengurangi pengeluaran anggaran negara mengenai blanko KTP-el. Selain itu, penggunaan IKD juga mampu mengamankan data pribadi masyarakat dengan lebih baik, melindungi privasi mereka dari potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam sistem tradisional.

Selain itu, penerapan IKD juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Dengan IKD, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi warga untuk mengelola informasi kependudukan mereka sendiri. Ini membantu mempermudah proses pengajuan permohonan administrasi kependudukan, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, atau keuangan, dan memberikan kemudahan akses ke berbagai layanan publik lainnya. Dengan begitu, penerapan IKD tidak hanya membawa manfaat dalam administrasi kependudukan yang lebih efisien, tetapi juga memberikan masyarakat lebih banyak kontrol atas identitas mereka sendiri serta akses yang lebih mudah ke berbagai layanan publik yang mereka butuhkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi data terkait registrasi identitas kependudukan digital (IKD) yang dibagi berdasarkan zona.

**Tabel 1. 1 Data Rekapitulasi Registrasi IKD 2023**

NO	UPTD	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	ZONA I	213	170	25	30	120
2	ZONA II	395	324	156	184	338
3	ZONA III	30	60	7	25	76
4	ZONA IV	11	47	46	29	49
5	ZONA V	130	77	38	54	60
6	ZONA VI	66	87	30	66	110
7	ZONA VII	92	32	16	5	119
8	ZONA VIII	238	210	132	222	309
9	ZONA IX	115	79	24	19	68
<b>SUB TOTAL</b>		1290	1086	474	634	1249
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>4733</b>				

*Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Registrasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuatif dalam pengaktifasian IKD dimana pengatviasian tertinggi terjadi pada bulan Maret sebanyak 1290 pengaktifasian IKD dan terendah terjadi pada bulan mei yaitu sebanyak 474 pengaktifasian IKD. Adapun data kependudukan tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Jumlah Data Penduduk Kota Palembang Tahun 2023**

WILAYAH	L	P	JML	L_WKTP	P_WKTP	JML_WKTP
KOTA PALEMBANG	881.429	880.030	<b>1.761.459</b>	620.647	637.126	<b>1.257.773</b>
ILIR BARAT DUA	34.784	34.712	69.496	24.679	25.326	50.005
SEBERANG ULU SATU	47.555	46.454	94.009	33.137	33.338	66.475
SEBERANG ULU DUA	53.263	52.321	105.584	37.263	37.635	74.898
ILIR BARAT SATU	75.187	75.752	150.939	53.126	55.513	108.639
ILIR TIMUR SATU	32.387	34.314	66.701	24.464	26.640	51.104
ILIR TIMUR DUA	42.529	42.883	85.412	30.693	31.869	62.562
SUKARAMI	101.071	101.020	202.091	69.234	71.351	140.585
SAKO	57.086	57.796	114.882	40.134	41.695	81.829
KEMUNING	40.830	41.297	82.127	29.486	30.669	60.155
KALIDONI	64.915	64.738	129.653	45.767	46.710	92.477
BUKITKECIL	19.026	19.442	38.468	14.039	14.674	28.713
GANDUS	40.466	39.393	79.859	27.761	27.462	55.223
KERTAPATI	49.600	48.251	97.851	34.415	34.155	68.570
PLAJU	49.288	48.784	98.072	34.981	35.609	70.590
ALANG-ALANG LEBAR	56.095	56.133	112.228	39.241	40.441	79.682
SEMATANGBORANG	32.880	32.502	65.382	21.992	22.523	44.515
JAKABARING	47.260	46.778	94.038	33.064	33.570	66.634
ILIR TIMUR TIGA	37.207	37.460	74.667	27.171	27.946	55.117

*Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Jumlah Penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang*

Dari kedua tabel diatas jika kita bandingkan antara jumlah penduduk yang sudah aktivasi IKD sebanyak 4733 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.257.773 jiwa maka persentase aktivasi IKD hanya sebesar 0,38% dari target nasional sebesar 25%. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivasi IKD di kota Palembang masih rendah.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang disusun menjadi beberapa aspek penting yang memengaruhi kelancaran dan kesuksesannya. Pertama, terdapat kendala dalam integrasi data di antara lembaga-lembaga pengguna data dan kolaborasi antar lembaga. Salah satu isu yang seringkali muncul adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat *scanner* yang belum tersedia di beberapa lembaga. Hal ini menjadi hambatan dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan data penduduk secara efisien, sehingga proses pembuatan identitas digital menjadi terhambat. Kedua, terdapat permasalahan di tingkat masyarakat yang juga memengaruhi implementasi IKD. Masih sering dijumpai warga yang belum memiliki *smartphone* atau jika pun memiliki, spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan untuk menginstal aplikasi IKD. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke identitas digital, yang dapat menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan layanan publik dan partisipasi warga dalam proses administrasi kependudukan. Ketiga, fitur-fitur dalam aplikasi IKD masih belum lengkap. Salah satu contohnya adalah kemampuan cetak mandiri oleh masyarakat yang saat ini masih terbatas, sebagian karena alasan keamanan data penduduk. Meskipun sedang dalam

masa perkembangan, kekurangan dalam fitur-fitur kunci seperti ini dapat mempengaruhi keefektifan aplikasi dan penerimaan masyarakat terhadap IKD.

Dalam mengatasi masalah-masalah ini, perlu adanya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan sektor swasta, untuk memastikan integrasi data yang lebih lancar, aksesibilitas yang lebih baik, dan pengembangan aplikasi yang lebih lengkap. Peningkatan infrastruktur teknologi dan literasi digital juga menjadi penting agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan IKD dengan efektif dan merasa percaya terhadap keamanan data mereka. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, implementasi IKD dapat menjadi lebih sukses dalam mendukung administrasi kependudukan yang modern dan efisien.

Dalam rangka perkembangan teknologi abad ke-21, transformasi digital, khususnya Identitas Kependudukan Digital (IKD), telah meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Namun, tantangan seperti integrasi data yang belum optimal dan aksesibilitas yang terbatas perlu diatasi. Kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan sektor swasta serta peningkatan infrastruktur teknologi dan literasi digital menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang modern dan inklusif. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam adaptasi masyarakat terhadap teknologi, membantu meningkatkan layanan publik, dan memenuhi harapan warga akan layanan digital yang efisien dan transparan. Transformasi digital di sektor publik bukan hanya sekadar perubahan digitalisasi, melainkan pendekatan organisasi komprehensif yang memerlukan

penyesuaian terus-menerus dalam proses, layanan, dan produk untuk memenuhi kebutuhan eksternal.

Berdasarkan hasil penemuan tersebut, membuat penulis sangat tertarik dalam melakukan penelitian pada efektivitas penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang?”

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk menganalisis Efektivitas dari Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang”

## **1.4 Manfaat**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu :

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan pengkajian mengenai ilmu administrasi publik dan memberikan kontribusi terhadap penelitian lain yang melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Palembang”

### **2. Manfaat secara praktis**



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran bagi semua pihak yang bersangkutan mengenai “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Palembang”

## DAFTAR PUSTAKA

- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.
- Kartiwa. A, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) hal 88
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Pangandaheng, F., Maramis, J. B., Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Transformasi Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Pada Sektor Bisnis Dan Pemerintah. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41388>
- Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a)*. 3.
- Putri, B., & Reviandani, O. (2023). Penerapan E-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6829>
- Rokhman, A., & Permadi, B.I. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *Journal of Public Policy and Administration*, 492)
- Soewarno Handayani, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013) hal 287
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
- Peraturan Walikota Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 mengenai Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.